

Disertasi

**KEDUDUKAN ANAK DALAM HUKUM
KELUARGA DI INDONESIA**



Oleh:
DIANA AMIR
NIM. 1131203010

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

KEDUDUKAN ANAK DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Disertasi

**Diajukan Untuk Memperoleh Derajat Doktor Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Andalas**



Oleh:

DIANA AMIR

NIM. 1131203010

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

KEDUDUKAN ANAK DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Oleh : Diana Amir

(Tim Pembimbing: Prof. Dr. Yaswirman, M.A.; Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H.;
Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H.)

ABSTRAK

Undang-Undang Perkawinan merupakan hukum nasional dalam bidang hukum keluarga. Ketentuan tentang kedudukan anak diatur dalam Pasal 42, 43, dan 44. Ketentuan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat yang berkaitan dengan kedudukan anak. Namun hal ini tidak sesuai dengan harapan, Permasalahan tentang kedudukan anak bermunculan di dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji: (1) Bagaimanakah kedudukan anak beserta hak-haknya berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia? (2) Perbuatan hukum apa saja yang menentukan kedudukan anak terhadap orang tua biologisnya? (3) Bagaimanakah ketentuan kedudukan anak dalam keluarga beserta hak-haknya menurut Undang-Undang Perkawinan? Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisis norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan hukum anak berdasarkan sistem hukum yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, pendekatan filsafat, dan pendekatan perbandingan. Jenis data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa perundang-undang yang terkait dengan kedudukan anak dan hak-hak anak, bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian yang terkait dengan penelitian penulis, dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedi hukum Islam. Hasil penelitian adalah: (1) Kedudukan anak beserta hak-haknya berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat (KUH Perdata) tidak sama antara sistem hukum yang satu dengan yang lain. Kedudukan anak beserta hak-haknya menurut hukum adat ditentukan oleh bentuk dari masyarakat adat tersebut dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Kedudukan anak beserta hak-haknya menurut hukum Islam ditentukan oleh kelahiran anak sebagai akibat dari perkawinan yang sah; sedangkan kedudukan anak beserta hak-haknya menurut hukum barat (KUH Perdata) berdasarkan perkawinan yang sah dan pengakuan anak; (2) Perbuatan hukum yang menentukan kedudukan anak terhadap orang tua biologisnya adalah: a) perkawinan wanita hamil, mengakibatkan anak yang berasal dari perzinaan dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya karena dilahirkan pada saat orang tuanya terikat dalam perkawinan; b) pengangkatan anak, mengakibatkan beralihnya kedudukan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat; c) pengakuan anak dan pengingkaran anak, mengakibatkan anak memiliki atau hilangnya hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya; (3) ketentuan kedudukan anak dalam keluarga beserta hak-haknya menurut UU Perkawinan belum dapat mengakomodir sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : Kedudukan Anak, Perbuatan Hukum, Ketentuan Kedudukan Anak
POSITION OF CHILDREN IN FAMILY LAWS IN INDONESIA

By : Diana Amir

(Team of Supervisors: Prof. Dr. Yaswirman, M.A; Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H.;
Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H.)

ABSTRACT

The Marriage Law is a national law in the field of family law. Provisions regarding the position of children are regulated in Articles 42, 43, and 44. These provisions are expected to solve problems in the community relating to the position of the child. But this is not in line with expectations, Problems about the position of children sprung up in the community. This study examines: (1) How is the position of children and their rights based on the legal system that applies in Indonesia? (2) What legal actions determine the position of the child towards his biological parents? (3) What are the provisions of the position of children in the family and their rights according to the Marriage Law? This type of research is normative juridical research, namely research that analyzes norms relating to the legal position of children based on the legal system in force. The research approach used is the approach to legislation approach, conceptual approach, historical approach, philosophical approach, and comparative approach. The type of secondary data derived from primary legal material in the form of legislation relating to the position of children and children's rights, secondary legal material in the form of literature and research results related to author research, and tertiary legal material in the form of dictionaries and encyclopedias of Islamic law. The results of the study are: (1) The position of the child and his rights based on the legal system in force in Indonesia, namely customary law, Islamic law, and western law (KUH Perdata) are not the same between one legal system and another. The position of the child and his rights according to customary law is determined by the form of the indigenous community and the form of marriage carried out by both parents. The position of the child and his rights according to Islamic law are determined by the birth of the child as a result of a legitimate marriage; while the position of the child and his rights according to the western law (KUH Perdata) based on legal marriage and recognition of children; (2) The act of law that determines the position of the child against his biological parents is: a) the marriage of a pregnant woman, resulting in a child who comes from adultery can have a legal relationship with his biological father because he was born when his parents were married; b) adoption of children, resulting in the transfer of the position of children from biological parents to adoptive parents; c) recognition of children and denial of children, resulting in children having or losing legal relationships between children and their biological fathers; (3) the provisions of the position of children in the family along with their rights under the Marriage Law have not been able to accommodate the legal system that lives in Indonesian society.

Keywords: Position of Children, Actions, Provisions for the Position of Children